

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang pada tahap pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut hakikatnya mempunyai tujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan proses pembangunan akan terus berlanjut sebagai suatu proses yang bersifat relatif untuk mencapai kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Melaksanakan pembangunan bukan hanya sekedar tugas dan peran pemerintah sebagai aparatur Negara , akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen lapisan masyarakat. Meskipun demikian, pemerintahlah yang memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembangunan. Pada hakikatnya pembangunan itu adalah ingin menciptakan suatu keadaan yang lebih baik pada masa kini dan masa yang akan datang serta masa lalu sebagai suatu perbandingan, artinya pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berlakunya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa banyak perubahan dan harapan dalam Pelaksanaan pemeritah di daerah. Munculnya birokrasi yang handal serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat menjadi idaman segenap rakyat indonesia.

Pelayanan publik merupakan dari sistem administrasi negara secara keseluruhan. Sebagai sebuah sistem, sistem administrasi negara sangat dipengaruhi oleh sub sistem lainya seperti sub sistem ekonomi, hukum, politik

sosial, dan budaya. Keseluruhan sub sistem tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tugas negara dalam memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak sipil warga.

Di Indonesia, sistem Administrasi Negara yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Sebagai fakta sejarah bangsa, sistem Administrasi yang diterapkan adalah peninggalan Kolonial yang juga memiliki dasar-dasar hukum dan kepentingan Kolonial. Struktur birokrasi, Norma nilai dan regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pemenuhan kepentingan penguasa dari pada pemenuhan hak sipil warga negara. Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat sebagai pelayan, bukan pihak yang dilayani.

Pada masa pembangunan seperti saat ini merupakan hal yang menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki administrasi dan pelayanan publik yang diberikan, sehingga tidak mempunyai *image* negatif dalam menjalankan tugas pemerintah. Gambaran mengenai perubahan yang perlu dilakukan oleh organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik diharapkan dapat menghilangkan dan menghilangkan krisis kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat otonomi daerah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pelayanan publik seharusnya dapat dilaksanakan yang bersifat cepat, tepat, terbuka, lengkap, wajar, dan terjangkau.

Pada masa otonomi daerah seperti saat sekarang ini banyak potensi-potensi yang dimiliki daerah yang dapat di manfaatkan dengan sebaik mungkin, baik dalam bentuk sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) dapat dikelola dan dikembangkan oleh daerahnya, ini tersebut harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan memberdayakan potensi-potensi daerah yang bersangkutan. Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, pembangunan yang di upayakan pemerintah hendaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, baik masyarakat kelas bawah, menengah maupun kelas atas.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Di awal pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi, bangsa Indonesia masih terperangkap dalam situasi dan kondisi yang memperhatikan sebagai akibat dan krisis ekonomi, politik dan kepercayaan yang sepenuhnya belum dapat di atasi. Situasi dan kondisi ini juga sedikit banyak mewarnai kehidupan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, namun tidak termasuk dalam kategori berat, terutama karena ketahanan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor agraris dan sektor lainnya.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang ada, telah menjadikan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang berpotensi bagi perkembangan sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Hal tersebut akan berdampak positif bagi daerah sekitar yaitu adanya penyerapan tenaga kerja. Salah satu upaya pemerintah dalam memerankan masyarakat untuk

pembangunan adalah dengan membuka kesempatan kerja dalam berbagai sektor dan di harapkan tingkat pengangguran semakin berkurang.

Berbicara mengenai ketenagakerjaan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi banyak permasalahan yang muncul di antaranya, sudah semakin banyaknya lulusan-lulusan baik dari tingkat sekolah menengah atas (SMA) maupun dari berbagai perguruan tinggi atau berbagai pendidikan non formal yang ada. Artinya setiap tahun pengangguran semakin meningkat, apabila tanpa di imbangi dengan adanya kesempatan kerja. Adapun kendala bagi pencari kerja yaitu sulitnya mendapatkan informasi tentang peluang kerja bagi pencari kerja, serta kurangnya mutu dan keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja sehingga menyulitkan sipencari kerja untuk mendapatka suatu pekerjaan.

Oleh karena hal tersebut di atas, maka pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Instansi khusus yang menangani tenaga kerja serta menyalurkan tenaga kerja pada pihak yang membutuhkan. Instansi tersebut bernama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja berdasarka peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2008 yaitu berisi tentang organisasi dan tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Bagi calon tenaga kerja ataupun bagi yang ingin mendapatkan informasi mengenai pekerjaan, mereka harus mengikuti administrasi pendaftaran pencari kerja yaitu mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Dengan demikian apabila suatu saat ada perusahaan atau pihak lain yang membutuhkan tenaga kerja, pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat menyalurkannya.

Pembuatan kartu pencari kerja atau AK/I juga sebagai salah satu persyaratan dalam melamar kerja, karena setiap perusahaan ataupun Instansi, pencari kerja harus terdaftar di dinas yang bersangkutan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan Keputusan Bupati Pasal 14 No 272 Tahun 2004 tentang petunjuk Pelayanan penempatan tenaga kerja bahwa berlakunya Kartu pencari kerja atau AK/I selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan harus di daftar ulang, tetapi hal tersebut jarang dilakukan masyarakat. Pada umumnya masyarakat, apabila belum mendapatkan pekerjaan mereka malas untuk melapor. Justru cenderung untuk membuat lagi apa apabila ada lowongan yang baru. Adapun ketentuan tidak berlakunya bukti pendaftaran pencari kerja (AK/I) yaitu sebagai berikut: (a) Pencari kerja tidak melapor atau tidak mendaftar ulang selama 6 (enam) bulan berturut-turut, (b) Penghapusan sebagai pencari kerja juga dapat di sebabkan : (1) *Permintaan sendiri*, (2) *Pindah wilayah*, dan (3) *Meninggal dunia*. (c) Biodata pencari kerja (AK/I) yang dihapuskan disimpan sebagai arsip.

Kartu pendaftaran pencari kerja bagi pelamar kerja merupakan syarat utama dalam melamar pekerjaan, tanpa memiliki AK/I seorang belum dianggap memenuhi persyaratan dalam bekerja. Berdasarkan daftar pencari kerja tahun 2011-2013, masyarakat membuat kartu AK/I mencapai 10.250 orang dan jumlah paling banyak dalam pembuatan kartu pencari kerja yaitu pada akhir tahun atau pada saat dibukanya suatu lowongan pekerjaan.

Masyarakat berbondong-bondong untuk membuat kartu pencari kerja, yang menjadi salah satu syarat dalam melamar pekerjaan. Apabila hal tersebut terjadi, masyarakat yang membuat kartu pencari kerja hingga mencapai 30-35 orang perharinya, sementara dalam proses administrasi pegawai yang melayani hanya sejumlah 3 (tiga) orang, dengan kondisi setiap pencari kerja ingin secepatnya di layani. Sehingga terjadi ketidak seimbangan antara yang melayani dan yang dilayani.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pasal 43 Nomor 4 Tahun 2004 bahwa bidang yang mengurus Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja atau AK/I yaitu pada Bidang Pelatihan, penempatan dan penyebarluasan kesempatan kerja Khususnya pada Sub Bidang Informasi Pasar Kerja. Adapun tugas-tugasnya yaitu sebagai berikut: (1) Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur Pelayanan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten, (2) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendafran pencari kerja dan lowongan kerja, (3) Penyusunan pengollahan dan penganalisaan data pencari kerja dan lowongan kerja skala kabupaten, (4) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten, (5) Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja, (6) Penyebarluasan sistim informai penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di Wilayah Kabupaten, (7) Sosialisasi terhadap subtansi perjanjian kerja penempatan TKI keluar negeri Skala Kabupaten, (8) Penyuluhan rekrutmen seleksi dan pengesahan pengantar kerja, (9) Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, serbiter di Wilayah Kabupaten, dan

(10) Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pengembangan WPT atau LPT skala kabupaten.

Dari keterangan tugas diatas, sudah jelas bahwasannya yang melayani dalam bidang Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja adalah Sub Bagian dari Informasi Pasar Kerja. Sementara dalam prakteknya ketika pegawai sudah kesulitan menghadapi masyarakat yang secara bersamaan dalam membuat Kartu pencari Kerja, mereka meminta bantuan pada pegawai yang bukan pada bidangnya, sehingga terjadi ketidakefektifan dalam bekerja atau melayani masyarakat, karena tidak adanya penguasaan dan pemahaman dalam bidang tersebut.

Adapun permasalahan lain ada pada sub bidang info pasar kerja yaitu tidak sampainya informasi yang disampaikan pada masyarakat, tentang persyaratan pendaftaran pencari kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sehingga menghambat proses penyelesaian dalam pembuatan kartu Pencari Kerja seperti halnya penambahan persyaratan baru yaitu menambah Nomor Induk Kependudukan (NIK), masyarakat banyak yang tidak mengetahuinya sehingga harus menanyakan ke Dinas yang bersangkutan, bagi yang belum memiliki NIK tersebut. Hal tersebut akan menjadi penghambat dalam pembuatan kartu AK/I, padahal kartu AK/I tersebut dibutuhkan cepat oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi dimasyarakat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, selain sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi para pencari kerja juga berfungsi sebagai wahana bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, tenaga kerja yang handal, bermutu, kreatif, berdiskusi tinggi sangat di harapkan oleh perusahaan. Karena itu, dalam menentukan siapa-siapa tenaga kerja

yang akan di pakai atau diterima oleh perusahaan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara umum, persyaratan yang harus di penuhi oleh sipencari kerja antara lain: (1) Seseorang pencari kerja harus sudah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan di buktikan memiliki Kartu Kuning, (2) Seseorang pencari kerja harus mempunyai surat keterangan berkelakuan baik dari pihak kepolisian, (3) Seseorang pencari kerja harus mempunyai identitas diri dengan bukti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Camat setempat, (4) Harus mempunyai Kartu Keluarga (KK) beserta Nomor Induk Kependudukan, (5) Mempunyai Pendidikan tertentu dengan bukti Ijazah yang dimiliki dari Sekolah Dasar (SD) Sampai Ijazah trakhir, (6) Seseorang pencari kerja harus berpengalaman di bidang yang ditekuni. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya, (7) Harus memiliki Pas fphoto dengan ukuran 3X4 CM.

Dari persyaratan-persyaratan di atas, ada salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pencari kerja yaitu seseorang pencari kerja tersebut telah terdaftar di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan menunjukkan kepemilikan Kartu AK/I, Kartu Pencari Kerja AK/I bagi perusahaan swasta maupun negeri yang membutuhkan tenaga kerja mempunyai arti yang sangat penting. Dengan adanya kartu AK/I, jika terjadi suatu perselisihan dalam bekerja maka masing-masing pihak dapat membawa permasalahan tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Tanpa Kartu Pencari Kerja atau AK/I, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak baik menimpa pekerja atau perusahaan, akibat dari ulah pekerjaannya maka pihak

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai pihak yang mewakili pemerintah tidak ikut campur tangan dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya lulusan-lulusan baik dari tingkat sekolah menengah keatas (SMA) maupun dari berbagai perguruan tinggi atau berbagai pendidikan non formal yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini menyebabkan banyaknya persaingan dalam proses pencari kerja, akan tetapi tidak diimbangi dengan kesempatan kerja sehingga menjadi kendala bagi pencari kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Banyaknya masyarakat yang membuat kartu pencari kerja akan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah pegawai yang memberikan pelayanan pada bidang pelatihan, penempatan dan penyebarluasan kesempatan kerja khususnya pada sub bidang informasi pasar kerja, yang melayani pembuatan kartu pencari kerja yang bukan pada bidangnya. Sehingga terjadilah ketidak efektifan dan menghambat proses dalam pembuatan kartu pencari kerja.
3. Adapun permasalahan lain ada pada Sub Bidang Info Pasar Kerja yaitu tidak sampainya informasi yang di sampaikan pada masyarakat, tantang persyaratan Pendaftaran Pencari Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sehingga menghambat proses penyelesaian dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang Administrasi Pembuatan Kartu Pencari Kerja atau AK/I dengan judul “**Analisis Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi**”. Dan peneliti menggunkan judul tersebut ini di karenakan mudah untuk mendapatkan informasi di tempat yang akan di teliti tersebut.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang dipaparkan pada latar belakang, tentang Analisis Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, Maka yang jadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi?
- b) Faktor apa yang mempengaruhi Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka peneliti ini bertujuan untuk:

- a) Untuk mengetahui Pelayanan Administrasi dan Prosedur Pembuatan Kartu Pencari Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

- b) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelayanan Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya adalah:

- a) Sebagai bahan informasi atau masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama tentang administrasi Pencari Kerja kabupaten Kuantan Singingi.
- b) Sebagai sarana bagi penulis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah penulis terima pada masa perkuliahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Skripsi ini di bagi dalam enam bab, dimana pembahasan tiap bab tersebut mempunyai kaitan antara satu dengan lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengemukakan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, serta merumuskan permasalahan yang di hadapi dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penguraian lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menggambarkan sejarah singkat kondisi daerah, visi dan misi, serta tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan dan skripsi yang di bahas tentang dekriptif variabel, analisa hasil penelitian Pelayanan Administrasi Pendaftaran Pencari Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian.